

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Fenomena Arab Spring yang dimulai pada tahun 2011 di Suriah berdampak pada adanya keinginan masyarakat untuk menurunkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang otokrasi menimbulkan demonstrasi dan pemberontakan yang bersifat *nationwide*. Munculnya kelompok-kelompok yang menginginkan adanya transisi politik seperti FSA dan kelompok-kelompok terorisme seperti Jabhat Al Nusra serta ISIS menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintahan Bashar Al Assad. Hal tersebut kemudian bertransformasi menjadi konfrontasi yang berujung pada perang saudara antara kelompok rezim dan kelompok oposisi.

Banyaknya korban jiwa akibat dari perang saudara tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari dunia internasional. PBB, melalui Sekjen Ban Ki Moon, mengklaim bahwa konflik yang terjadi di Suriah tersebut sudah masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebab terhitung hingga tahun 2012, jumlah korban meninggal telah mencapai angka 200.000 jiwa. Pengupayaan resolusi untuk konflik tersebut dilakukan dengan cara menggelar Geneva Peace Talks pada tahun 2012 oleh PBB dan berkat inisiatif dari Amerika Serikat sebagai bentuk keprihatinan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah.

Pertemuan multilateral tersebut menghasilkan adanya inisiatif untuk merancang draft resolusi 2254 oleh PBB yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Isi dari draft tersebut adalah upaya untuk mengadakan transisi politik di Suriah sebab pemerintahan Bashar Al Assad dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan konflik dan dituduh Amerika Serikat sebagai diktator serta aktor kunci dari krisis kemanusiaan yang terjadi.

Upaya pembuatan draft tersebut kemudian diveto oleh Rusia. Rusia menganggap bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Suriah adalah dengan membantu mengembalikan kedaulatan pemerintah negara Suriah, sebab dengan kedaulatan, pemerintah Suriah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pada tahun 2013, Amerika Serikat dan sekutunya membentuk aliansi untuk melakukan intervensi militer dalam konflik di Suriah yang menargetkan ISIS dan Jabhat Al Nusra sebagai lawannya. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan pendanaan terhadap FSA.

Hal ini kemudian direspon oleh Rusia dengan secara mengejutkan menurunkan pasukan militernya untuk terlibat dalam konflik di Suriah pada tahun 2015. Rusia menegaskan bahwa keterlibatannya adalah untuk menyerang ISIS dan Jabhat Al Nusra, sama seperti Amerika Serikat dan koalisinya. Namun, serangan Rusia justru lebih banyak ditujukan untuk kelompok FSA yang didanai oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan tindakan Rusia mendapat kecaman dari dunia internasional.

Sikap Rusia yang cenderung melakukan *dangerous movement* tersebut merupakan refleksi dari sifat negara yang *self-help* dalam struktur internasional yang anarki. Sebagai *great power*, tindakan Rusia merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap Suriah dimana Suriah merupakan *geopolitical strategic partner* Rusia di wilayah Timur Tengah. Menyelamatkan kedaulatan Suriah berarti menyelamatkan kepentingan Rusia di Suriah dan pengaruhnya di Timur Tengah. Suriah merupakan jembatan penghubung Rusia dengan Timur Tengah sekaligus pembendung pengaruh Amerika Serikat di regional tersebut.

Penting bagi Rusia untuk membantu menyelamatkan rezim Bashar Al Assad. Sejalan dengan pendekatan *state-centric*, dengan mengembalikan kedaulatan Suriah, maka Suriah dapat menyelesaikan konflik internalnya sendiri sebab negara merupakan unit tertinggi dalam tatanan internasional. Kemudian, hubungan perdagangan antara Rusia dan Suriah dan adanya pangkalan laut Rusia di Suriah yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, merupakan bentuk-bentuk kepentingan Rusia yang berkaitan erat dengan keamanannya dalam segi ekonomi dan militer. Dengan kedatangan Amerika Serikat dan sekutunya di Suriah yang menyatakan kontra terhadap rezim Bashar Al Assad, menempatkan Rusia dalam kondisi ketidakpastian terhadap *survival*-nya dan mengancam kepentingan Rusia di Suriah.

Keterlibatan Rusia dalam konflik yang terjadi di Suriah juga merupakan bentuk dari upaya offensive dalam kebijakan luar negerinya. Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara-negara *nuclear super power*. Meskipun keterlibatan kedua negara tersebut dalam konflik di Suriah jauh dari indikasi kemungkinan

perang nuklir, namun menarik dari sifat *great power* yang akan selalu bersifat *offensive* dengan kapabilitasnya untuk selalu meningkatkan *power* ketika struktur internasional yang bersifat anarki tidak dapat menjamin *survival*-nya, maka perang nuklir atau sekedar melakukan *arms race* bisa saja terjadi seperti pada saat Perang Dingin. Oleh karenanya, intervensi militer Rusia tahun 2015 merupakan bentuk respon dari intervensi militer Amerika Serikat tahun 2013 dan upaya *buck-passing* Rusia sebagai *great power* terhadap Suriah.

Selain itu, asumsi Rusia sebagai negara *veduschie mirovye derzhavy* membentuk karakter Rusia yang bersifat *offensive* dalam kebijakan luar negerinya di Suriah dengan melakukan tindakan yang dianggap Amerika Serikat sebagai *dangerous movement*. Namun hal ini dianggap sebagai tindakan yang tepat bagi *great power* untuk merespon *great power* yang lain ketika keberadaannya telah mengancam kepentingannya di negara lain yang berimplikasi pada keamanan nasionalnya. Meskipun teori *offensive realism* mengakui bahwa menjadi hegemon bukan hal yang mudah, namun pengaruh geopolitik merupakan langkah awal yang esensial sebelum mencapai hegemoni. Oleh karena itu, tindakan Rusia dalam konflik di Suriah dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan *offensive*, untuk mempertahankan dan memperkuat pengaruhnya di Suriah sebagai upaya untuk menjadi penguasa tunggal di wilayah Timur Tengah.

## 4.2. Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Pertama, penelitian ini tidak memprediksikan kesempatan antara Rusia dan Amerika Serikat untuk menjadi pemenang dalam konflik di Suriah. Kedua, penelitian ini tidak menjelaskan alasan Rusia dalam keinginannya untuk menjadi penguasa tunggal di wilayah regional Timur Tengah secara detail. Ketiga, penelitian ini tidak membahas dari sisi Suriah terkait konflik yang terjadi secara detail. Oleh karena itu, dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut maka, peneliti memberi saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Menganalisis dalam bentuk penelitian yang bersifat prediktif terkait kemungkinan dan peluang antara Rusia dan Amerika Serikat untuk menjadi pemenang dalam konflik yang terjadi di Suriah serta bagaimana kecenderungan arah politik Suriah setelahnya.
2. Menjelaskan dan memberikan analisis terkait efektivitas Geneva Peace Talks oleh PBB dengan menggunakan teori lain seperti *institutional liberalism*.
3. Memberikan gambaran dan penjelasan terkait bagaimana politik dan strategi Presiden Bashar Al Assad untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah.

Terkait permasalahan penelitian ini, adapun yang dapat diusulkan dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya pertemuan trilateral antara Vladimir Putin, Donald Trump, dan Bashar Al Assad untuk melakukan kompromi dalam upaya rekonsiliasi konflik yang terjadi di Suriah.
2. Peninjauan kembali efektivitas Geneva Peace Talks.
3. Rusia dan Amerika Serikat perlu melakukan kerja sama untuk memberantas kelompok-kelompok terorisme yang juga menengarai perang saudara di Suriah.
4. Perlu adanya penegakan hukum internasional terkait dengan adanya kemanusiaan seperti timbulnya banyak korban jiwa dan pengungsi yang merupakan dampak dari instabilitas politik yang terjadi di Suriah.